

Partisipasi Institusi Pedesaan dan Efektivitas Program Bangga Kencana

Hafied Maulana Ibrahim¹, Muhammad Husein Maruapey², Agus Suarman Sudarsa³

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: hafidzraden003@gmail.com^{1*}, m.husein.maruapey@unida.ac.id², agussuarman08@gmail.com³

Info Artikel

Submitted: 19 Maret 2026

Revised: 31 Maret 2026

Accepted: 15 April 2026

Published: 20 April 2026

Keywords: Rural Institutions, Community Participation, Family Development, Program Effectiveness, Bangga Kencana

Kata Kunci: Institusi Pedesaan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Keluarga, Efektivitas Program, Bangga Kencana

Abstract

Penelitian ini menganalisis partisipasi institusi masyarakat pedesaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta implikasinya terhadap efektivitas program di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Penelitian ini berangkat dari masih terbatasnya kajian yang menempatkan institusi masyarakat pedesaan sebagai aktor utama pembangunan keluarga berbasis komunitas dan belum banyaknya penelitian yang menghubungkan pola partisipasi, faktor yang memengaruhi, strategi penguatan, serta outcome program secara integratif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif. Data dikumpulkan pada Agustus sampai Oktober 2025 melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan kuesioner pendukung terhadap koordinator program, penyuluh lapangan, aparatatur kecamatan dan desa, kader masyarakat, pengurus kelompok bina keluarga, tokoh masyarakat, dan keluarga penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi relatif aktif pada tahap pelaksanaan, tetapi masih lemah pada tahap perencanaan dan evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan institusi masyarakat pedesaan penting untuk menggeser partisipasi dari simbolik menjadi substantif guna meningkatkan efektivitas program, perubahan perilaku, dan kesejahteraan keluarga.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif dapat dibangun untuk memperkuat pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor. Kajian terdahulu umumnya menitikberatkan pada pendidikan kewirausahaan, kewirausahaan digital, atau pengembangan usaha mikro dan kecil, sedangkan model kolaborasi multipihak pada level lokal masih relatif terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan yang dipilih secara purposif dari unsur pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, pelaku usaha muda, dan akademisi, serta didukung observasi dan data program. Analisis dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berlangsung, tetapi masih terfragmentasi. Teknologi komunikasi telah digunakan secara luas, namun belum tersedia platform terintegrasi yang menghubungkan para aktor. Kapasitas digital masih timpang, budaya organisasi masih dipengaruhi ego sektoral dan kekakuan birokrasi, kepercayaan antarpihak belum kokoh, dan tujuan bersama belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam aksi bersama. Penelitian ini menawarkan model kolaborasi yang dibangun atas lima dimensi yang saling terkait, yaitu teknologi komunikasi terintegrasi, peningkatan kapasitas digital berkelanjutan, budaya kolaboratif, kepercayaan yang terlembagakan, dan tujuan bersama yang diformalkan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pembangunan keluarga menempati posisi penting dalam agenda pembangunan nasional karena keluarga merupakan unit sosial paling dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka tersebut, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana menjadi instrumen kebijakan yang diarahkan tidak hanya pada pengendalian kependudukan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup keluarga melalui pendekatan yang lebih holistik dan berbasis masyarakat. Pendekatan ini menuntut keterlibatan aktor lokal yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan realitas sosial masyarakat.

Dalam praktiknya, keberhasilan program berbasis keluarga tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, melainkan juga oleh kualitas partisipasi masyarakat. Literatur partisipasi menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna harus mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, bukan sekadar kehadiran formal dalam kegiatan program. Karena itu, institusi masyarakat pedesaan seperti kader posyandu, PKK, kelompok Bina Keluarga, dan tokoh masyarakat menjadi unsur strategis dalam mendukung keberhasilan program.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program keluarga dan kesehatan berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh peran kader, lembaga lokal, dan kualitas kolaborasi antarpihak. Namun, sebagian besar studi masih membahas partisipasi masyarakat atau implementasi program secara terpisah. Kajian yang secara khusus menempatkan institusi masyarakat pedesaan sebagai aktor utama, lalu menghubungkannya dengan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, strategi penguatan, dan implikasi terhadap efektivitas Program Bangga Kencana, masih relatif terbatas.

Kecamatan Cijeruk relevan dikaji karena memiliki karakteristik sosial pedesaan, jaringan kelembagaan lokal yang aktif, dan sasaran keluarga yang besar. Wilayah ini terdiri atas sembilan desa dengan jumlah penduduk 101.096 jiwa dan 30.104 kepala keluarga, sehingga menjadi konteks penting untuk menilai bagaimana institusi masyarakat bekerja dalam mendukung pembangunan keluarga di tingkat akar rumput. Heterogenitas pendidikan, mata pencaharian, dan nilai sosial budaya di wilayah ini juga berpotensi memengaruhi penerimaan serta partisipasi masyarakat terhadap program.

Artikel ini berargumen bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana

di tingkat lokal bukan semata-mata terletak pada keberadaan institusi masyarakat, tetapi pada kualitas partisipasi institusi tersebut dalam seluruh tahapan program. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan integratif atas pola partisipasi, faktor yang memengaruhi, strategi penguatan, dan implikasinya terhadap efektivitas program. Dengan demikian, artikel ini bertujuan menganalisis kualitas partisipasi institusi masyarakat pedesaan dalam Program Bangga Kencana di Kecamatan Cijeruk serta menjelaskan mengapa penguatan kelembagaan lokal menjadi prasyarat bagi peningkatan efektivitas program.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi evaluatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha memahami secara mendalam dinamika partisipasi institusi masyarakat pedesaan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, termasuk faktor yang memengaruhinya, strategi penguatan yang dijalankan, serta implikasinya terhadap keberhasilan program.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dengan pengumpulan data utama pada Agustus sampai Oktober 2025. Informan ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program. Informan terdiri atas koordinator keluarga berencana kecamatan, penyuluh lapangan, aparatur kecamatan dan desa, kader posyandu, kader PKK, pengurus kelompok BKB, BKR, BKL, tokoh masyarakat, serta masyarakat peserta program. Jumlah informan direncanakan sekitar 15 orang dan pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai kejenuhan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan kuesioner pendukung. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi institusi masyarakat pedesaan dalam Program Bangga Kencana di Kecamatan Cijeruk bersifat tidak merata pada setiap tahapan program. Partisipasi paling kuat terjadi pada tahap pelaksanaan, sedangkan tahap perencanaan dan evaluasi masih menunjukkan kecenderungan partisipasi yang terbatas. Pola ini menunjukkan bahwa keberadaan institusi lokal belum otomatis berarti keterlibatan substantif dalam proses pembangunan

keluarga.

Pada tahap perencanaan, partisipasi institusi masyarakat pedesaan cenderung formalistik. Masyarakat dan unsur kelembagaan lokal memang hadir dalam forum musyawarah, tetapi keterlibatannya belum mencapai pengaruh nyata terhadap keputusan program. Temuan wawancara menunjukkan bahwa usulan masyarakat tidak selalu terakomodasi menjadi prioritas, sedangkan hasil observasi lapangan juga memperlihatkan keterlibatan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan masih rendah. Kondisi ini menandakan partisipasi masih lebih dekat pada bentuk simbolik dibanding partisipasi substantif.

Berbeda dengan tahap perencanaan, partisipasi pada tahap pelaksanaan tergolong lebih aktif. Kader posyandu, kader PKK, dan pengurus kelompok Bina Keluarga menjadi motor utama kegiatan seperti penyuluhan, pendampingan keluarga, dan penggerakan peserta. Observasi kegiatan penyuluhan memperlihatkan bahwa sekitar 60% undangan hadir dan keterlibatan peserta didominasi oleh kader serta kelompok masyarakat yang telah aktif sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa kelembagaan lokal memiliki kapasitas mobilisasi yang penting di tingkat akar rumput.

Pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat mulai merasakan manfaat program, terutama dalam bentuk peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, kesadaran tentang perencanaan keluarga, dan perubahan cara pandang terhadap kualitas keluarga. Meskipun demikian, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, tahap evaluasi menjadi titik terlemah karena proses evaluasi masih didominasi oleh petugas dan pelaksana teknis, sedangkan masyarakat belum memperoleh ruang yang memadai untuk memberi umpan balik secara sistematis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas partisipasi dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan, nilai sosial budaya, kepemimpinan lokal, dan koordinasi antarlembaga. Keterbatasan kapasitas membuat pemahaman program belum merata. Nilai sosial budaya tertentu masih memengaruhi sikap terhadap jumlah anak dan penggunaan kontrasepsi. Selain itu, dukungan tokoh masyarakat berperan besar dalam menggerakkan partisipasi warga, sedangkan koordinasi antarlembaga yang belum optimal melemahkan konsistensi pelaksanaan program.

Dalam konteks strategi penguatan, penelitian menemukan bahwa pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan memang telah dilakukan, tetapi sifatnya belum berkelanjutan, belum terintegrasi, dan belum cukup berbasis kebutuhan masyarakat. Penguatan perlu diarahkan pada tiga agenda utama, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, perluasan ruang deliberasi masyarakat dalam

perencanaan dan evaluasi, serta pembentukan koordinasi kerja yang lebih konsisten antara penyuluh, pemerintah desa, dan institusi masyarakat.

Implikasi dari pola partisipasi tersebut terlihat pada efektivitas program. Program tetap berjalan dan memberikan dampak positif pada pengetahuan dan perilaku sebagian keluarga, namun hasilnya belum maksimal karena partisipasi masyarakat belum menyentuh seluruh tahapan program. Akibatnya, perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan keluarga muncul, tetapi belum merata. Dengan demikian, persoalan utama di Cijeruk bukan tidak adanya partisipasi, melainkan ketimpangan kualitas partisipasi antar tahapan program.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi institusi masyarakat pedesaan dalam Program Bangga Kencana di Kecamatan Cijeruk belum berlangsung optimal pada seluruh tahapan program. Partisipasi relatif kuat pada tahap pelaksanaan karena ditopang oleh kader dan kelembagaan lokal yang aktif, tetapi masih lemah pada tahap perencanaan dan evaluasi. Kualitas partisipasi dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan, nilai sosial budaya, kepemimpinan lokal, dan koordinasi antarlembaga. Strategi penguatan yang telah dijalankan belum cukup berkelanjutan, belum terintegrasi, dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan warga. Oleh sebab itu, efektivitas Program Bangga Kencana di wilayah pedesaan akan lebih mungkin ditingkatkan apabila penguatan institusi masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas, perluasan ruang partisipasi dalam perencanaan dan evaluasi, serta penguatan kolaborasi lintas aktor di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan lokal bukan elemen pelengkap, melainkan syarat penting bagi pembangunan keluarga berbasis komunitas yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Astuti, Y. (2020). Analisis peran kader dalam program KB. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(3), 55–68.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). Laporan tahunan Program Bangga Kencana tahun 2022. BKKBN.
- BPS Kabupaten Bogor. (2023). Data statistik Kecamatan Cijeruk tahun 2022. Badan Pusat Statistik.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity

- through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fitriani, E. (2022). Kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik*, 9(2), 120–134.
- Kurniasih, T. (2022). Evaluasi Program Bangga Kencana di wilayah pedesaan. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Desa*, 5(1), 1–12.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rachmawati, D., & Yuliani, S. (2021). Partisipasi lembaga lokal dalam penurunan stunting. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 18(2), 101–112.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.